



**BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
TUGAS BELAJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme PNS dan mengurangi kesenjangan kompetensi pegawai, perlu dilakukan pengembangan kompetensi salah satunya melalui bentuk Pendidikan formal;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana tempat Pegawai Negeri Sipil bertugas.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana.
7. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
8. Tugas belajar adalah penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai kompetensi dan formasi pemerintah daerah baik di dalam maupun di luar negeri.
9. Tugas belajar beasiswa adalah penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai kompetensi dan formasi

- pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan pada jam kerja maupun di luar jam kerja dan dibiayai oleh sponsor.
10. Tugas belajar biaya mandiri adalah penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan kondisi tertentu untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai kompetensi dan formasi pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan pada jam kerja maupun di luar jam kerja dan dilakukan dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil.
  11. Sponsor adalah pemberi dana untuk biaya pendidikan dari lembaga pemerintah atau swasta yang berbadan hukum yang diberikan untuk tugas belajar beasiswa.
  12. Tugas belajar berkelanjutan adalah penugasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang baru menyelesaikan pendidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
  13. Lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan negeri, lembaga pendidikan ikatan dinas, dan/atau lembaga pendidikan swasta.
  14. Program pendidikan tertentu adalah program pendidikan yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu.
  15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  16. Rekomendasi adalah surat persetujuan dari pemerintah daerah untuk mengikuti ujian seleksi pada lembaga pendidikan tertentu yang akan ditempuh.
  17. Program Pendidikan Formal adalah program pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
  18. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
20. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
21. Instansi Daerah lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
25. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud memberikan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas belajar dan upaya untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- c. pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

## BAB II PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Tugas belajar terdiri dari:

- a. Tugas belajar beasiswa; dan
- b. Tugas belajar biaya mandiri.

#### Pasal 5

- (1) Tugas belajar dapat diberikan kepada PNS yang mengikuti program pendidikan formal untuk jenjang tertentu pada lembaga pendidikan.
- (2) Program pendidikan formal untuk jenjang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Sekolah Menengah Pertama atau yang disetarakan, Sekolah Menengah Atas atau yang disetarakan, Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata 1, Strata 2, Strata 3, dan pendidikan profesi.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau hari Sabtu-Minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian dan universitas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua  
Pemberian Tugas  
Belajar

Pasal 6

- (1) Tugas belajar beasiswa dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
  - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling singkat 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia jabatan atau sesuai persyaratan dari lembaga pemberi sponsor;
  - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  - d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
  - e. tidak dikenakan hukuman disiplin kategori ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
  - f. menduduki pangkat pengatur muda golongan II/a paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Diploma I, Diploma II, dan Diploma III;
  - g. menduduki pangkat pengatur muda tingkat I golongan II/b paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Diploma IV dan Strata 1;
  - h. menduduki pangkat penata muda golongan III/a paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Strata 2;
  - i. menduduki pangkat penata muda tingkat I golongan III/b paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Strata 3;
  - j. menandatangani perjanjian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Kepala BKPSDM yang memuat subjek perjanjian, kesepakatan para pihak, dan objek yang

diperjanjikan;

- k. sehat jasmani dan rohani; dan
- l. memiliki masa kerja di Pemerintah Daerah minimal 2 (dua) tahun bagi PNS mutasi antar instansi pemerintah yang masuk ke Pemerintah Daerah.

(2) Tugas belajar biaya mandiri dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
  - 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia jabatan, untuk tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan; atau
  - 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan;
- c. menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang dinyatakan secara tertulis oleh OPimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- e. tidak dikenakan hukuman disiplin kategori ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- f. bagi peserta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, menduduki pangkat juru muda golongan I/a paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang disetarakan dan Sekolah Menengah Atas atau yang disetarakan;
- g. bagi peserta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, menduduki pangkat pengatur muda golongan II/a paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Diploma I, Diploma II, dan Diploma III;

- h. bagi peserta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, menduduki pangkat pengatur muda tingkat I golongan II paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Diploma IV dan Strata 1;
- i. bagi peserta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, menduduki pangkat penata muda golongan III/a paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Strata 2;
- j. bagi peserta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, menduduki pangkat penata muda tingkat I golongan III/b paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Strata 3.
- k. bagi peserta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, menandatangani perjanjian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Kepala BKPSDM yang memuat subjek perjanjian, kesepakatan para pihak, dan objek yang diperjanjikan;
- l. sehat jasmani dan rohani;
- m. bagi peserta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, memiliki masa kerja di Pemerintah Daerah minimal 2 (dua) tahun bagi PNS mutasi antar instansi pemerintah yang masuk ke Pemerintah Daerah; dan
- n. Ijazah pendidikan sebelumnya telah diakui secara sah dalam administrasi kepegawaian.

### BAB III

#### PROSEDUR DAN PERSYARATAN

##### PERMOHONAN

##### Bagian Kesatu

##### Prosedur Permohonan

##### Pasal 7

- (1) PNS melalui Pimpinan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan, mengajukan permohonan rekomendasi tugas belajar beasiswa kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (2) Permohonan rekomendasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum PNS yang bersangkutan mengikuti program pendidikan.

- (3) Rekomendasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala BKPSDM.

#### Pasal 8

- (1) PNS melalui Pimpinan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan, mengajukan permohonan tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (2) Permohonan tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum PNS peserta tugas belajar mengikuti program pendidikan.
- (3) Permohonan tugas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum PNS peserta tugas belajar selesai mengikuti program pendidikan.
- (4) Penetapan atas permohonan tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibebaskan dari jabatan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Surat tugas belajar biaya mandiri yang tidak dibebaskan dari jabatan, diberikan oleh Kepala BKPSDM.

#### Pasal 9

- (1) Selain melalui pengajuan permohonan tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tugas belajar dapat dilaksanakan melalui penunjukan Bupati.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan penyesuaian kualifikasi pendidikan terhadap syarat jabatan dan/atau penghargaan bagi PNS berprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Penunjukan tugas belajar oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjaringan/seleksi peserta dan verifikasi oleh BKPSDM dan/atau memenuhi ketentuan pemberian penghargaan PNS berprestasi.

Bagian Kedua  
Persyaratan  
Pasal 10

- 1) Persyaratan permohonan rekomendasi tugas belajar beasiswa:
  - a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
  - b. surat permohonan dari Pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM; dan
  - c. surat permohonan dilampiri dengan surat penawaran dan surat keterangan akreditasi terbaru dari lembaga pendidikan dan program pendidikan yang akan diikuti.
  
- 2) Persyaratan permohonan tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan:
  - a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
  - b. surat permohonan dari Pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
  - c. rincian perhitungan kuota jumlah PNS yang menjalankan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan pada Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
  - d. Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pendidikan yang akan ditempuh dibutuhkan, tidak mengganggu ketugasan dan yang bersangkutan selama mengikuti pendidikan harus dibebaskan dari jabatan karena sifat pendidikan dan teknis pelaksanaan pendidikan yang akan diikuti tidak dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ketugasan jabatan;
  - e. salinan sah Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - f. salinan/fotokopi sah sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasikerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. surat keterangan sumber dana sponsor apabila ada;
  - h. surat keterangan lulus seleksi penerimaan sebagai mahasiswa;
  - i. surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
  - j. surat keterangan sehat rohani dari dokter spesialis kejiwaan rumah sakit pemerintah;

- k. daftar riwayat hidup; dan
  - l. rekomendasi dari Kepala BKPSDM untuk tugas belajar beasiswa.
- 3) Persyaratan permohonan tugas belajar yang tidak dibebaskan dari jabatan:
- a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
  - b. surat permohonan dari Pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
  - c. salinan sah Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - d. salinan/fotokopi sah sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. surat rekomendasi dari Pimpinan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh benar-benar sesuai kebutuhan Perangkat Daerah dan tidak mengganggu ketugasan;
  - f. daftar riwayat hidup;
  - g. surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
  - h. surat keterangan sehat rohani dari dokter spesialis kejiwaan rumah sakit pemerintah;
  - i. surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dari lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan dilengkapi jadwal kuliah semester berjalan;
  - j. surat keterangan dari Pimpinan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan yang menyatakan bahwa kegiatan pendidikan peserta tugas belajar biaya mandiri tidak mengganggu pelaksanaan tugas dinas;
  - k. surat keterangan akreditasi lembaga pendidikan yang bersangkutan; dan
  - l. surat pernyataan bermeterai cukup tidak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu  
Pasal 11

PNS peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan menyelesaikan pendidikannya dalam kurun waktu sebagai berikut:

- a. program Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. program Diploma I paling lama 1 (satu) tahun;
- c. program Diploma II paling lama 2 (dua) tahun;
- d. program Diploma III paling lama 3 (tiga) tahun;
- e. program Diploma IV atau Strata 1 paling lama 5 (lima) tahun apabila untuk mengikuti program pendidikan tersebut menggunakan ijazah SMU/SMK, dan paling lama 2 (dua) tahun apabila untuk mengikuti program pendidikan tersebut menggunakan ijazah Diploma III;
- f. program Strata 2, dan pendidikan profesi paling lama 2 (dua) tahun;
- g. program Strata 3 paling lama 3,5 (tiga setengah) tahun;
- h. dikecualikan bagi pendidikan tertentu, masa tugas belajar diberikan sesuai pembiayaan yang diberikan oleh sponsor atau ketentuan lembaga pendidikan.

Pasal 12

- (1) PNS peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dapat diberikan perpanjangan jangka waktu untuk menyelesaikan pendidikannya paling lama 6 (enam) bulan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) PNS setelah perpanjangan paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, maka diberikan perpanjangan lagi paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan

berdasarkan kriteria:

- a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
  - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
  - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh PPK.
- (5) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (6) PNS peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, dan tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya sampai selesai sesuai ketentuan batas waktu tempat pendidikannya, dengan perubahan status menjadi tugas belajar biaya mandiri dan diaktifkan kembali sebagai pelaksana atau jabatan fungsional.

#### Bagian Keempat

#### Tugas Belajar Berkelanjutan

#### Pasal 13

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mendapat persetujuan PPK;
  - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
  - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
  - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.

- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ikatan dinas bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasi setelah PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 14

- (1) Hak PNS peserta tugas belajar beasiswa:
  - a. Gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  - b. hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
  - c. biaya studi sesuai dengan perjanjian dan/atau pembiayaan yang diatur oleh lembaga pendidikan; dan
  - d. penyesuaian ijazah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Hak PNS peserta tugas belajar biaya mandiri:
  - a. gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai.

### Bagian Kedua

#### Kewajiban

## Pasal 15

- (1) Kewajiban PNS tugas belajar:
  - a. mengikuti seluruh tahapan pendidikan yang diikuti;
  - b. menyelesaikan dan lulus pendidikan tepat waktu;
  - c. menunjukkan sikap perilaku sesuai kode etik dan perilaku PNS selama menjalankan studi;
  - d. menandatangani perjanjian sebelum melaksanakan tugas belajar bagi PNS tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan;
  - e. melaporkan progres pelaksanaan pendidikan setiap semester kepada Kepala BKPSDM melalui Kepala Perangkat Daerah;
  - f. melaporkan kelulusan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar; dan
  - g. melaksanakan ikatan dinas:
    1. selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS tugas belajar beasiswa;
    2. selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS tugas belajar beasiswa yang tidak dibebaskan dari jabatannya;
    3. selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatannya.
- (2) PNS yang menjalani tugas belajar beasiswa lebih dari 6 (enam) bulan yang menduduki jabatan struktural atau fungsional dibebaskan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya dan tetap melaksanakan kewajiban sesuai jabatannya.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (5) Pemberian tugas belajar tidak boleh mengganggu pelaksanaan urusan Perangkat Daerah.

- (6) Jumlah PNS yang dapat diberikan tugas belajar biaya mandiri dengan dibebaskan dari jabatan adalah paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah PNS di Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan.
- (7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh PNS peserta tugas belajar bermeterai cukup dan diketahui oleh Kepala BKPSDM.
- (8) Selama menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, PNS yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (9) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dilaksanakan di instansi pemerintah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang memenuhi alasan pertimbangan kemanusiaan dan disetujui oleh PPK.

## BAB V

### PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian kesatu

#### Pembatalan

#### Pasal 16

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
  - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang;
  - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan

- kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
  - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- 3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

## Bagian Kedua Pemberhentian

### Pasal 17

- 1) Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan pemberhentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- 2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
  - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
  - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  - e. PNS tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena mengundurkan diri tanpa alasan yang sah atau

- dikeluarkan oleh lembaga pendidikannya;
- f. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
  - g. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS peserta tugas belajar beasiswa apabila pemberian tugas belajarnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
- a. apabila biaya pendidikan berasal dari Pemerintah Daerah, PNS tugas belajar beasiswa wajib mengembalikan semua biaya yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah dengan cara menyetorkan ke Kas Umum Daerah;
  - b. apabila biaya pendidikan berasal dari sponsor, maka PNS peserta tugas belajar beasiswa wajib memenuhi segala ketentuan yang telah disepakati dengan pihak sponsor; dan
  - c. peserta tugas belajar beasiswa tidak dapat diberi kesempatan kembali sebagai peserta tugas belajar.

## BAB VI PENUGASAN PNS TUGAS BELAJAR

### Pasal 18

- (1) Apabila diperlukan, Bupati dapat menugaskan PNS peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan untuk melaksanakan tugas dinas.
- (2) PNS Peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII PASCA TUGAS BELAJAR

### Pasal 19

- (1) PNS peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri setelah menyelesaikan pendidikan mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Gelar yang diperoleh peserta tugas belajar beasiswa dan tugas

belajar biaya mandiri setelah menyelesaikan pendidikan dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

- 1) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 20

- 1) BKPSDM melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas belajar di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi atas progres peningkatan pendidikan dari masing-masing peserta tugas belajar.
- 3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

### Pasal 21

- 1) BKPSDM melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas belajar di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap alumni tugas belajar, atasan, dan rekan kerja.
- 4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 22

- 1) PNS peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan wajib melapor hasil pelaksanaan tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan diketahui Pimpinan Perangkat Daerah pada setiap akhir semester dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya.
- 2) PNS peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri apabila telah menyelesaikan pendidikannya wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM diketahui Kepala Perangkat Daerah, dengan menyerahkan salinan sah ijazah, salinan sah transkrip nilai, salinan sah surat tugas belajar dan salinan sah karya tulisnya.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- 1) Pembiayaan tugas belajar beasiswa dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Peserta tugas belajar beasiswa yang seluruh biaya pendidikannya mendapat bantuan dari sponsor, biaya yang diperlukan selama menempuh pendidikan menjadi tanggungan sponsor.
- 3) Peserta tugas belajar beasiswa yang sebagian biaya pendidikannya mendapat bantuan dari sponsor, dapat diberikan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah selama yang bersangkutan berstatus tugas belajar, dengan besaran bantuan biaya pendidikan ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- 4) Peserta tugas belajar beasiswa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan bantuan biaya

Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) wajib yang dibebankan oleh lembaga tempat pendidikannya dan bantuan lainnya sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan Daerah.

- (5) Peserta tugas belajar melalui penunjukan oleh Bupati dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sponsor.
- (6) Pembiayaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

#### Pasal 24

- (1) Pembiayaan pendidikan peserta tugas belajar biaya mandiri ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (2) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersedia, kepada peserta tugas belajar biaya mandiri dapat diberikan bantuan biaya pendidikan.
- (3) PNS melalui Pimpinan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan, mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

#### Pasal 25

Besaran pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

PNS diperbolehkan mengambil prodi dengan akreditasi C dengan catatan di Daerah tidak ada prodi yang sama yang berakreditasi B dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri.

### Pasal 27

Kepada Calon PNS yang pada saat diangkat menjadi Calon PNS sedang mengikuti Pendidikan pada suatu Lembaga Pendidikan tertentu diberikan Surat Keterangan Sedang Menyelesaikan Pendidikan.

### Pasal 28

PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

### Pasal 29

PNS atau Calon PNS yang sedang mengikuti program pendidikan formal Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata 1, Strata 2, Strata 3 dan pendidikan profesi yang belum memiliki tugas belajar, dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 27.

### Pasal 30

PNS peserta tugas belajar, izin belajar, dan izin belajar khusus yang ditetapkan sebelum Keputusan ini berlaku dan masih menjalankan pendidikannya dinyatakan tetap sebagai peserta tugas belajar, izin belajar, dan izin belajar khusus dan selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2015 Nomor 34);

- b. Peraturan Bupati Bombana Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 7).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

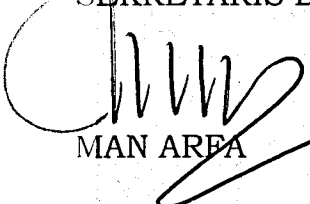
Ditetapkan di Rumbia pada  
tanggal, 22-8-2023

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 22-8-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

  
MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 25